

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENETAPKAN HARGA
PATOKAN EKSPOR PRODUK KAKAO DARI INDONESIA
KE TIONGGOK TAHUN 2012-2015**

Oleh: Dicky Shandri

Email: dickyshandri@gmail.com

Pembimbing Afrizal S.IP MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This research describe the policy of Government of Indonesia implemented export constant price for cocoa product from Indonesia to China in 2012-2015. Indonesia are one of most countries that have production of cocoa between Pantai Gading, Ghana and Brazilia. China are one of country that be a export purpose cocoa product from Indonesia. But in 2010 China have create a protection policy with increase the tax for cocoa export from Indonesia and it's make disadvantage for Indonesia.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the policy of Government of Indonesia implemented export constant price for cocoa product from Indonesia to China. The theories applied in this research are merchantilism with the foreign policy theory from Viotti Kaupi.

The result shows that the policy of Government of Indonesia implemented export constant price for cocoa product from Indonesia to China are becaused trade protection from China with implemented custom tariff 10% for cocoa product from Indonesia and 0% for the other countries likes Malaysia, Thailand and etc. The policy of Government of Indonesia implemented export constant price for cocoa product from Indonesia to China are by Trade minister regulations Number 21/M/DAG/PER/5/2010 about constant price for ex customin standart proce for cocoa products.

Key words: policy, constant, price and cocoa.

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik yang menganalisa mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia menetapkan Harga Patokan Ekspor produk kakao dari Indonesia ke Tiongkok tahun 2012-2015. Salah satu bentuk hubungan internasional dewasa ini adalah kerjasama internasional antar negara. Kerjasama internasional antar negara ini dilakukan atas dasar saling membutuhkan dan menguntungkan antara kedua belah pihak.

Salah satu negara di kawasan Asia yang memiliki potensi dibidang ekonomi dan perdagangan adalah negara Tiongkok. Kakao merupakan tanaman tropis tahunan yang berasal dari Amerika Selatan. Dari Amerika Selatan tanaman ini menyebar ke Amerika Utara, Afrika, dan Asia.¹ Di Indonesia, budidaya kakao diusahakan oleh perusahaan Perkebunan Negara dan Swasta serta Perkebunan Rakyat. Lokasi perusahaan perkebunan skala besar yang diusahakan negara terletak di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa timur. Beberapa produk olahan yang dapat dihasilkan dari kakao yaitu, *cocoa liquor*, *cocoa butter*, *cocoa cake* dan *cocoa powder*. Produk tersebut

dapat dijelaskan melalui pohon industri kakao.²

Perkebunan kakao di Indonesia didominasi perkebunan rakyat dengan porsi 92,34 persen, yang melibatkan petani sebanyak 1.400.636 kepala keluarga. Nilai ekspor kakao tahun 2007 mencapai 950,6 juta dollar AS atau sekitar Rp 9,50 triliun, yang menempatkan kakao sebagai penghasil devisa terbesar untuk ekspor komoditas perkebunan setelah kelapa sawit dan karet. Produksi kakao terbesar atau 63,3 persen berasal dari Sulawesi, meliputi Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas tanaman kakao 257.011 ha, Sulawesi Barat 156.88 ha, Sulawesi Tenggara 244.629 ha, dan Sulawesi Selatan 252.574 ha.

Pengembangan tanaman kakao di Indonesia hingga tahun 2003 telah mencapai 964.223 ha dengan produksi 698.816 ton biji kakao kering yang diperkirakan pada tahun 2005 naik menjadi 992.448 ha dengan produksi 652.396 ton biji kakao kering, tersebar di 31 propinsi. Indonesia pada saat ini sebagai negara produsen kakao terbesar ke-tiga dunia setelah Cote d'Ivoire dan Ghana. Jumlah petani kakao mencakup 1,098 juta kepala keluarga. Ekspor komoditi kakao

¹ Anonymous, 2005

² Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, 2004. *Statistik Perkebunan Indonesia 2001-2003, Kakao*. Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Jakarta

mencapai nilai US \$ 546,56 juta dengan volume 0,367 juta ton pada tahun 2004. (Departemen Pertanian, 2006).

Sejak tahun 2008, Pemerintah Tiongkok mengenakan diskriminasi terhadap kakao (cocoa cake) asal Indonesia dengan cara mengenakan tarif BM sebesar 10%, sedang impor dari Malaysia tidak dikenakan bea masuk atau nol persen. Perlakuan diskriminatif tersebut sangat merugikan ekspor kakao Indonesia ke pasar Tiongkok. Hal ini ditambah lagi dengan negara itu merupakan pasar yang sangat besar dengan penduduk lebih dari satu miliar. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dan Perindustrian menetapkan kebijakan harga patokan ekspor terhadap ekspor produk pertanian dari Indonesia ke Tiongkok.

Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-Dag/Per/5/2010 tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar. Hal ini dikarenakan bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis

dan hasil rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait dan kondisi proteksi perdagangan yang dilakukan oleh Tiongkok menetapkan Pemerintah Indonesia untuk melindungi petani kakao dari Indonesia.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Penulis menggunakan pendekatan merkantilisme diperkenalkan oleh Jean Boudin dan Thomas Mun. Perspektif Merkantilisme berkembang di Eropa pada abad ke 16 dan 18 yang terjadi pada masa-masa negara Eropa melakukan proses membangun negara bangsa (nation state). Pemikiran kaum merkantilisme menyatakan bahwa logam mulia merupakan lambang kekayaan utama bangsa agar dapat menumpukkan kekayaannya yang

dapat dimanfaatkan melalui perdagangan internasional.

Untuk membangun negara bangsa yang kuat untuk memerlukan pengintegrasian politik dan ekonomi sehingga negara harus melibatkan diri secara aktif untuk mengatur ekonomi demi meningkatkan kekuasaan negara. Oleh sebab itu untuk mempertahankan perekonomiannya supaya tetap kuat maka harus melakukan hubungan ekonomi melalui surplus perdagangan dengan membatasi impor dan menggalakkan ekspor sebanyak-banyaknya. Hubungan dapat disimpulkan bersifat zero sum game (konflik bukan bersifat harmonis).

Tingkat analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat negara-bangsa, dalam hubungan internasional negara sering kali yang menjadi pembuat keputusan yang tentunya tidak bertindak sendiri-sendiri namun berperan sebagai kelompok. Hubungan internasional berdasarkan analisa ini merupakan interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan. Peranan negara sangat penting dalam kerjasama antar negara satu dengan negara lain walaupun oknum yang bekerja dalam melakukan hubungan perdagangan atau terjadinya blok perdagangan adalah kelompok importir maupun eksportir.

Ekonomi internasional merupakan hubungan ekonomi antarnegara di dunia. Hubungan tersebut menimbulkan saling ketergantungan (*interdependence*) antara negara satu dengan negara lainnya dan merupakan esensi yang penting untuk peningkatan kesejahteraan hidup hampir semua negara di dunia, selain itu hubungan ini tidak hanya identik dengan hubungan ekonomi internasional antarnegara namun sebagian besar berhubungan dengan perdagangan internasional. Bidang ekonomi internasional seperti pertukaran jasa, komoditi, modal, teknologi informasi dan komunikasi.

Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya. Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional yang dirumuskan oleh Donald E. Nuchterlain terbagi atas empat poin, yaitu:

1. Defense Interest: Kepentingan untuk melindungi Negara atau rakyat dari ancaman fisik dari Negara lain atau perlindungan

ancaman terhadap sistem suatu Negara.

2. **Economic Interest:**
Kepentingan ekonomi yang berupa tambahan nilai secara ekonomi dalam hubungannya dengan Negara lain dimana hubungan perdagangan yang dilakukan dengan Negara lain akan memberikan keuntungan.
3. **World Order Interest:**
Kepentingan tata dunia dengan adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu Negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat beroperasi diluar batas Negara dengan aman.
4. **Ideological Interest:**
Kepentingan ideologi dengan perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu Negara yang berdaulat.

Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain, maka analisis kebijakan Pemerintah Indonesia menetapkan harga patokan ekspor produk kakao dari Indonesia ke Tiongkok tahun 2012-2015 adalah bentuk kepentingan ekonomi Indonesia ke Tiongkok. Berdasarkan

kepentingan ekonomi maka kebijakan Pemerintah Indonesia menetapkan harga patokan ekspor produk kakao dari Indonesia ke Tiongkok tahun 2012-2015 adalah untuk menciptakan iklim investasi dan kepastian hukum kepada eksportir kakao dari Indonesia ke Tiongkok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Perdagangan Bebas antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Tiongkok (ACFTA) yang berlaku efektif 1 Juli 2004 secara signifikan menguntungkan ekonomi dan perdagangan intraregional serta akan menjadi acuan bagi hubungan ekonomi ASEAN-Tiongkok di masa datang. Pembentukan ACFTA dimaksudkan juga sebagai tonggak kerja sama antara kedua wilayah yang akan menciptakan kawasan dengan 1,7 miliar konsumen, suatu kawasan dengan produk domestik bruto (PDB) sekitar US\$ 2,0 triliun dan total perdagangan setiaptahunnya mencapai nilai US\$ 1,23 triliun.

Penghapusan rintangan perdagangan antara ASEAN dan Tiongkok akan membantu menurunkan biaya, meningkatkan volume perdagangan dan meningkatkan efisiensi ekonomi. ACFTA tersebut akan menjamin stabilitas di Asia Timur dan

memberikan kesempatan baik negara anggota ASEAN maupun Tiongkok untuk mempunyai peranan lebih besar dalam perdagangan internasional yang memberikan keuntungan bersama. Termasuk meningkatkan kerjasama antara ASEAN dan Tiongkok dibidang lainnya. Semua anggota ASEAN mengharapkan manfaat dari ACFTA. Manfaat tersebut akan tergantung pada kesiapan sektor swasta di setiap negara untuk mengeksploitasi berbagai kesempatan dalam ACFTA. Berdasarkan ACFTA, negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok terbebas dari pajak atas 7.000 kategori komoditi dan memberikan status bebas bea bagi semua komoditi tersebut dalam perdagangan bilateral pada 2010.

Begitu pula dengan sektor pertanian menunjukkan implementasi ACFTA dapat meningkatkan nilai perdagangan ASEAN dan Tiongkok. Pada tahun 1999-2001 (pra ACFTA) pertumbuhan impor dari ASEAN ke Tiongkok adalah 17,3% per tahun, tetapi dalam kurun waktu tahun 2001-2005 melonjak menjadi 27,3%, dengan nilai impor US\$ 5 juta. Dalam kurun waktu 2001-2005, rata-rata pertumbuhan ekspor produk pertanian dari Tiongkok ke ASEAN mencapai 17% per tahun, tetapi nilai tersebut lebih rendah dari nilai impornya.

Tiongkok mengalami defisit perdangan produk pertanian dengan ASEAN mencapai US\$ 2,8 juta di tahun 2005.

Pada perdagangan komoditas hortikultura dengan adanya ACFTA ekspor hortikultura Indonesia ke Tiongkok tahun 2010 mencapai USD 12,4 juta atau meningkat 8 kali dari tahun 2004. Namun neraca perdagangan komoditas hortikultura Indonesia masih mengalami defisit, dikarenakan produk hortikultura, seperti bawang putih, dan buah-buahan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia masih banyak diimpor dari Tiongkok. Namun demikian defisit komoditas pertanian tersebut tertutup besarnya nilai ekspor komoditas perkebunan.

Seiring terjadinya perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan Cina termasuk Indonesia, maka dalam perjalanannya pemerintah Cina telah melakukan diskriminasi terhadap kakao (cocoa cake) asal Indonesia dengan cara mengenakan tarif bea masuk (BM) sebesar 10% ke Cina, sedangkan impor kakao dari Malaysia tidak dikenakan bea masuk atau 0%. Perlakuan diskriminatif tersebut sangat merugikan ekspor kakao Indonesia ke pasar Cina. Hal ini ditambah lagi dengan Cina yang merupakan pasar yang sangat potensial

dan besar dengan penduduk lebih dari satu miliar.

Tindakan diskriminatif tersebut jelas merupakan pukulan telak bagi pengusaha kakao Indonesia mengingat dengan adanya pengenaan bea masuk ekspor kakao oleh pemerintah Cina maka peluang Indonesia kian sulit untuk mendapatkan keuntungan dalam melakukan perdagangan internasional. Tindakan diskriminatif tersebut juga berlaku bagi ekspor kakao cair asal Indonesia yang dikenakan tarif BM sebesar 10%, sedang impor dari Malaysia 0%. Demikian pula impor kakao mentega (cocoa butter) Indonesia yang dikenakan tarif BM 22%, sedang dari Malaysia hanya 5%, untuk impor kakao olahan asal Indonesia dikenakan tarif 15% sedang dari Malaysia hanya 5%. Zulhefi mengatakan, akibat tindakan diskriminasi tersebut kakao asal Indonesia harga jualnya di pasar Cina menjadi lebih mahal dibandingkan kakao yang berasal dari Malaysia.

Khusus bagi negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dan Brunei telah mulai menerapkan bea masuk 0% per Januari 2006 untuk beberapa produk berkategori Early Harvest Program. Meski telah dimulai sejak tahun 2006, sebenarnya skema *Asean-China Free Trade Area*

(ACFTA) ini benar-benar terasa sejak Januari tahun 2010, hal ini dikarenakan sesuai perjanjian *Asean-China Free Trade Area* ACFTA, pada tahun 2010 adalah tahap Normal Track diberlakukan dimana sebagian besar barang impor akan mendapatkan keringanan bea masuk (BM) hingga 0%. Pada 1 Januari 2010 ini sebanyak 83% dari 8738 produk impor Cina bebas masuk ke pasar Indonesia tanpa dikenai bea masuk satu rupiah pun. Sedangkan sebanyak 1598 produk Cina akan mendapat penurunan tarif BM sebesar 5%.

Dampak dari pemberlakuan ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) adalah mencermati dan mencari tahu, produk-produk barang apa saja yang masuk dalam skema kerjasama pasar bebas ASEAN-Cina ini. Terutama yang masuk dalam skema Normal Track, yaitu barang-barang yang kini bisa Sensitive Track. Sensitive Track ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yakni: menikmati bea masuk 0% persen sejak 1 Januari 2010. Jika kita adalah produsen barang-barang yang sama dengan barang-barang impor bebas bea masuk dari Cina atau Negara ASEAN lain, maka kita harus waspada dengan segala keunggulan komparatifnya, terutama harga yang sangat bersaing, bukan tidak mungkin barang substitusi yang diimpor dari

Cina bisa mendominasi pasar dan mematikan bisnis produsen lokal.

Pemberlakuan ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) bisa menjadi peluang meningkatkan ekspor kakao. Namun, hal tersebut harus pula diimbangi pembebasan bea masuk bagi bahan baku agar dapat produk kakao Indonesia mampu berkompetisi dengan kompetitor dari Malaysia dan Cina. Ketua Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo), Halim A Razak, memaparkan, industri kakao lokal masih tergantung pada bahan baku impor. Industri dalam negeri harus mencampur bahan baku lokal dengan 10 sampai 15 persen biji kakao impor untuk meningkatkan kualitas. Asal bahan baku impor ini adalah negara-negara Afrika yang tidak memiliki perjanjian pasar bebas dengan Indonesia.

Pemerintah masih mengenakan bea masuk lima persen untuk bahan baku dan produk cokelat yaitu bubuk dan butter. Dengan pemberlakuan ACFTA, Halim mengatakan, produk kakao Indonesia akan kehilangan daya saing. Karena, produk Malaysia dan Cina tak lagi dikenai bea masuk ke Indonesia. Padahal, kedua negara yang menjadi pesaing terkuat Indonesia itu tak mengenakan bea masuk bagi bahan baku dari Afrika. Akibatnya, produk mereka lebih kompetitif dari segi

harga. Karenanya, pemerintah harus membebaskan bea masuk bagi bahan baku kakao. Tidak ada negara di dunia yang mengenakan bea masuk bagi biji kakao," paparnya. Sebenarnya, pasar bebas memberi peluang baik bagi industri kakao. Sejak Januari 2007, pemerintah membebaskan bea ekspor bagi biji dan produk kakao ke Cina dan negara-negara ASEAN. Selama periode itu pula ekspor kakao Indonesia meningkat dari delapan juta ton menjadi 35 juta ton.

Tetap berlakukan SNI Menteri Perindustrian, MS Hidayat, menjelaskan, mengacu pada prinsip regulasi yang baik, pemerintah akan melanjutkan kebijakan pemberlakuan SNI secara wajib. Pemberlakuan itu dalam rangka perlindungan konsumen dan penciptaan persaingan yang sehat. Menurut Halim, produk pertanian sangat tergantung faktor alam seperti curah hujan dan kesuburan tanah, maupun ancaman hama. Karenanya, standardisasi produk pertanian untuk diekspor akan mematikan peluang kakao merebut pasar perdagangan bebas. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki infrastruktur seperti penyediaan jaminan listrik agar industri bisa berproduksi maksimal, Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Djauhari Oratmangun,

mengatakan negara-negara ASEAN lain akan mengambil porsi perdagangan Indonesia-Cina bila Indonesia menunda pelaksanaan ACFTA.

Perdagangan kakao dunia didominasi oleh biji kakao dan produk akhir (cokelat), sedangkan produk antara (cacao butter, cocoa powder dan cocoa paste) volumenya relatif kecil. Pada tahun 2001/02, volume ekspor biji kakao mencapai 2,12 juta ton, dan re-ekspor 235 ribu ton. Pada periode yang sama, volume ekspor produk akhir (cokelat) mencapai 2,9 juta ton. Sementara volume ekspor kakao butter, kakao powder dan kakao paste masing-masing sebesar 528 ribu ton, 594 ribu ton dan 341 ribu ton. Eksportir utama biji kakao dunia tahun 2001/02 ditempati oleh Pantai Gading dengan total ekspor 1 juta ton. Eksportir terbesar berikutnya adalah Indonesia, Ghana dan Nigeria dengan volume masing-masing 365 ribu ton, 285 ribu ton dan 160 ribu ton.

Di sisi lain, importir terbesar biji kakao dunia adalah Belanda dengan volume 493 ribu ton, diikuti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Malaysia dan Inggris dengan volume impor masing-masing 397 ribu ton, 212 ribu ton, 143 ribu ton, 114 ribu ton, dan 107 ribu ton. Belanda sebagai importir terbesar biji kakao sekaligus

berperan sebagai re-ekspor terbesar biji kakao dunia dengan volume 78,2 ribu ton. Pada periode yang sama, volume ekspor produk akhir kakao (cokelat) terbesar ditempati oleh Jerman dengan total ekspor 405 ribu ton, disusul Belgia, Kanada, Prancis dan Belanda dengan volume ekspor masing-masing 332 ribu ton, 266 ribu ton, 228 ribu ton dan 215 ribu ton. Sementara itu, importir terbesar produk akhir kakao adalah Amerika Serikat dengan volume 382 ribu ton, diikuti Prancis dan Jerman masing-masing 308 ribu ton dan 270 ribu ton.

Dampak terhadap adanya penenaan tarif terhadap kakao dari Indonesia adalah Kendala utama yang dialami Indonesia dalam pengembangan industri pengolahan kakao adalah kebijakan negara-negara maju pengolah kakao yang sangat melindungi industri pengolahannya. Instrumen kebijakan yang digunakan adalah penerapan eskalasi tarif, yaitu penenaan tingkat tarif lebih tinggi pada produk impor yang mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Dalam kasus kakao, tarif impor untuk cocoa butter dan cocoa powder lebih tinggi daripada tarif impor cocoa beans. Kebijakan tersebut menyebabkan struktur ekspor kakao Indonesia sangat didominasi oleh kakao biji (lebih dari 90%), walaupun pertumbuhan ekspor

kakao cukup cepat. Kebijakan itu pula yang menyebabkan industri pengolahan (grinding) kakao di Indonesia sangat lambat berkembang, karena produknya dikenakan tarif sangat tinggi di negara-negara pengimpornya.

Industri pengolahan yang masih bertahan saat ini disebabkan oleh strategi pengintegrasian pemilikan industri pengolahan kakao di Indonesia dengan industri pengolahan kakao di negara pengimpornya. Dalam hal ini, industri pengolahan di Indonesia sebagai pemasok bahan baku setengah jadi (*cocoa butter, cocoa powder, dll*) kepada industri pengolah yang ada di luar negeri. Dengan strategi ini, masalah eskalasi tarif dapat diatasi secara mudah. Sebagian industri pengolah di Indonesia juga menghasilkan produk makanan jadi (*snack bar*) untuk konsumsi dalam negeri, tetapi jumlahnya tidak banyak. Cina memberikan kebebasan tarif pajak dan bea masuk terhadap impor kakao dari Malaysia dan Singapura.

Permintaan dunia terhadap produk olahan kakao juga terus meningkat sekitar 2%-4% per tahun atau sekitar 60.000 hingga 120.000 ton/tahun. Bahkan, pasar makin terbuka jika konsumsi coklat tiga negara berpenduduk besar, yakni

Indonesia, India dan Cina meningkat dari hanya 0,06 kg/kapita/tahun menjadi 1 kg/kapita/tahun. Menteri Pertanian Suswono berharap, kebijakan pemerintah dengan mengenakan BK akan mendorong pertumbuhan industri kakao dalam negeri. Selama ini dia mengakui, banyak industri kakao yang gulung tikar karena kekurangan bahan baku. Sementara banyak produk biji kakao yang diekspor. Perusahaan pengolahan biji kakao Bumitangerang yang kini masih kekurangan bahan baku, sehingga sebagian bahan bakunya harus impor. Padahal, Indonesia termasuk salah satu produsen terbesar kakao dunia. "Ini baru satu contohnya. Padahal, perusahaan tersebut berjalan cukup baik. Saat ini ada sekitar sembilan industri kakao mati karena kekurangan bahan baku.

Untuk kedepannya, dengan berlakunya bea keluar biji kakao, pemerintah akan mendorong petani memproduksi kakao yang berfermentasi, sehingga nilai tambahnya akan lebih tinggi. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib kakao. Kita harapkan produksi kakao petani ini akan diserap industri dalam negeri dengan harga lebih tinggi. Pemerintah sudah mencanangkan program

fermentasi. Sementara itu Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Achmad Mangga Barani Pihaknya hanya bertugas agar produksi kakao dalam negeri bisa mencapai di atas 1 juta ton, yang kini baru sekitar 600.000 ton. Tapi kita berharap sebagian dana bea keluar untuk membiayai program perbaikan produksi dan mutu kakao dalam negeri.

Hal ini ditambah lagi dengan banyak industri kakao yang tutup karena kekurangan bahan baku. Sementara fakta lain, hampir 80% produksi biji kakao dalam negeri yang diekspor dalam bentuk biji, sisanya 20% diekspor dalam bentuk jadi atau produk olahan. Sementara Wakil Ketua Dewan Kakao Indonesia, Teguh Wahyudi menegaskan, bagi pemerintah tidak ada pilihan lain untuk menghentikan arus keluar ekspor biji kakao selain menghilangkan daya saing ekspor dalam bentuk biji ini. Salah satunya dengan menerapkan bea keluar biji kakao yang diekspor.

Selama ini, menurut Teguh, ekspor kakao dalam bentuk biji sudah dikuasai eksportir/trader asing yang sudah bercokol bertahun-tahun di Indonesia. Kalau bea keluar ini tidak diterapkan, pabrik kakao dalam negeri kalah bersaing dengan Malaysia. Bea Keluar bukanlah hal yang baru bagi stakeholder kakao nasional dan telah

melalui pembahasan serta analisis panjang, baik stakeholder kakao maupun pemerintah. Kebijakan Bea keluar merupakan pengganti dihapuskan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10% atas biji kakao. Bahkan, kesepakatan ini tertuang dalam hasil Musyawarah Nasional ASKINDO pada 6 September 2004. Dukungan pemberlakuan Bea keluar juga telah muncul dari Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) dan asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Cokelat Indonesia (APIKCI).

Adanya dukungan dari stakeholder kakao membuat Presiden RI melalui Surat Mensesneg No. B.168/M.Sesneg/03/2005 tertanggal 17 Maret 2005 mengeluarkan dukungan juga. Surat Mensesneg itu menyatakan, untuk menumbuhkembangkan industri coklat di dalam negeri Menteri Keuangan diminta untuk segera mengatur penghapusan PPN dan penerapan Pungutan Ekspor biji kakao. Kami berharap agar pemberlakuan bea keluar saat ini tidak lagi dipenuhi dengan pro dan kontra. Tapi justru dapat dimanfaatkan seluruh stakeholder kakao nasional untuk membangun industri kakao nasional yang kuat dari hulu hingga hilir. Karena itu, untuk menarik investasi dari luar negeri, Piter mengusulkan agar dibentuk tim kerja

dari BKPM. Tim ini nantinya bertugas mengundang industri kakao di luar negeri merelokasikan industrinya ke sentra-sentra produksi biji kakao di Indonesia, seperti Sulawesi, Sumatera, Jawa dan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia menetapkan harga patokan ekspor produk kakao dari Indonesia ke Tiongkok karena adanya proteksi perdagangan yang diterapkan oleh Pemerintah Tiongkok. Seiring terjadinya perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan Cina termasuk Indonesia, maka dalam perjalanannya pemerintah Cina telah melakukan diskriminasi terhadap kakao (cocoa cake) asal Indonesia dengan cara mengenakan tarif bea masuk (BM) sebesar 10% ke Cina, sedangkan impor kakao dari Malaysia tidak dikenakan bea masuk atau 0%. Perlakuan diskriminatif tersebut sangat merugikan ekspor kakao Indonesia ke pasar Cina. Hal ini ditambah lagi dengan Cina yang merupakan pasar yang sangat potensial dan besar dengan penduduk lebih dari satu miliar.

Tindakan diskriminatif tersebut jelas merupakan pukulan telak bagi pengusaha kakao Indonesia mengingat

dengan adanya pengenaan bea masuk ekspor kakao oleh pemerintah Cina maka peluang Indonesia kian sulit untuk mendapatkan keuntungan dalam melakukan perdagangan internasional. Tindakan diskriminatif tersebut juga berlaku bagi ekspor kakao cair asal Indonesia yang dikenakan tarif BM sebesar 10%, sedang impor dari Malaysia 0%. Menghadapi kebijakan tersebut, maka pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-Dag/Per/5/2010 tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan pada tahun 2012 ekspor produk kakao dari Indonesia memiliki harga standar dalam ekspor kakao.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Donald E. Nucterlain. 1979. National Interest A new Approach, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring).

International Cocoa Organization (ICCO), 2003. Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics. Vol: XXIX (2)

Sulistiyowati, E. A.A. Prawoto, S. Wardani, dan H. Winarno. 1995. Laporan Kunjungan Kaji Banding Pengendalian Hama Penggerek Buah kakao di

- Malaysia . Warta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Vol. 11, No. 1: 45-51.
- Yanyan Mochamad Yani, M.A. Makna Strategis Kerjasama Militer RI – Tiongkok. Bandung. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Padjajaran. 2012 Volume 1 Nomor 1.
- Buku**
- Anton M. Moelino, 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Balai Bahasa. 2002. Kamus Besar Bahasa. Indonesia edisi 2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Blum, Robert, M. 1982. Drawing the Line: The Origin of the American Containment Policy in East Asia. New York: Norton.
- Deliarnov, 1995. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pertanian Republik Indonesia. 2006. Perkembangan pertanian kakao di Indonesia. Jakarta. Kementerian Pertanian RI.
- Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, 2004. Statistik Perkebunan Indonesia 2001-2003, Kakao. Jakarta. Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan.
- Holsti, K. J. 1992. Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis. Bandung: Binacipta.
- I. Wibowo. 2004. Belajar dari Tiongkok. Jakarta. Penerbit Buku Kompas.
- Kagan, Robert. 2008. The Return of History and End of Dreams. London: Atlantic Books.
- Kroef Justus M. van der. 1998. The Sino-Indonesian Rupture, New York: American-Asian Educational Exchange.
- Kurlantzick, John. 2007. Charm Offensive: How Tiongkok's Soft Power is Transforming the World. New Haven: Yale University Press.
- Leo Suryadinata, 1998. Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Soeharto, Jakarta: LP3ES.
- M. Sabir. 1997. Politik Bebas aktif: Tantangan dan Kesempatan. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer. CV. Haji Masagung.
- Maleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Mohtar Mas'ood, 1990. Ekonomi Politik Internasional.

Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial.

Overholt, Wiliam H. 1999. *The Rise of Tiongkok: How Economic Reform is Creating A New Superpower*. New York. WW. Norton.

Plano Jack C. 2001. *Kamus Hubungan internasional*. Jakarta: Putra Abardin.

Roesmanto, J., 1991. *Kakao: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta. Aditya Media.

Yuanzhi, Kong. 1999. *Silang Budaya China Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Zainuddin Djafar, 2008. *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur, Kajian Perspektif Asia Ekonomi- Politik*, Jakarta: Pustaka Jaya.

Website

[http// www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id). Indonesia dan Tiongkok Siap Tandatangani Perjanjian Ekstradisi. Portal Nasional Republik Indonesia. Pada tanggal 11 Desember 2009

<http://:bataviase.co.id/node/255445>. Diakses tanggal 19 Maret 2011, pukul 21.05 wib.

[http//www](http://www). Daya saing pertanian indonesia dalam ACFTA. Pada tanggal 24 juli 2010

[http//www](http://www). Pusat data kementerian komunikasi dan informatika © 2009. Pada tanggal 23 Maret 2010.

[http//www](http://www). [Republika.com](http://www.Republika.com). Pemerintah tetapkan bea keluar kakao ke Indonesia. Pada tanggal 7 September 2010

[http//www](http://www). [webadmin\[at\]depkominform.go.id](http://webadmin[at]depkominform.go.id) . Pemerintah : penetapan bea keluar ekspor kakao tidak mendadak. Pada tanggal 10 Maret 2011

[http//www](http://www). [bisnis.com](http://www.bisnis.com). Indonesia masih impor kakao 22.967 ton. Oleh Sepudin Zuhri. Pada tanggal 5 Agustus 2010

[http//www](http://www). [HubunganIndonesia](http://www.HubunganIndonesia) dan Tiongkok terus Meningkatkan.com. pada tanggal 10 Maret 2011

[http//www](http://www). [kompas.com](http://www.kompas.com). Cina Diskriminasi Kakao Indonesia. Oleh Zulhefi. Pada tanggal 24 Juli 2010

[http//www](http://www). [kompas.com](http://www.kompas.com). Memperindag Setuju Kakao Dikenakan Pajak. Pada Selasa tanggal 5 Juli 2010.

[http//www](http://www). [Republika.com](http://www.Republika.com). Bebaskan Bea Masuk Kakao. Pada tanggal 10 Maret 2011

<http://www.Republikaopini.com>. Cina
Diskriminasi Kakao Indonesia.
Pada tanggal 20 Mei 2011

<http://www.wordpress.com>. ACFTA
Dalam Perspektif Hubungan
Dagang Indonesia Tiongkok.
Oleh Latif Adam. Pada tanggal
19 Maret 2011

<http://www/koran-tempo.com>.
Pembatasan Ekspor Kakao
Untungkan Indonesia. Oleh
Eka Utami Aprilia. Pada
tanggal 10 Mei 2010

[http://www.penerapanBKdanKisah
SuksesGhana.com](http://www.penerapanBKdanKisahSuksesGhana.com). pada
tanggal 15 Mei 2010

[http://indonesia.com/definisionline/?ta
g=mengenai definisionline
perdamaian](http://indonesia.com/definisionline/?tag=mengenaidefinisionlineperdamaian). Pada tanggal 5
oktober 2009 pukul 17.03 WIB

<http://m.suaramerdeka.com>. Neraca
Perdagangan Indonesia-
Tiongkok Defisit. Oleh kartika
Runiasari. Pada tanggal 10
April 2011